



**IST
DISKUSI
DEWAN -**
Agenda dis-
kusi 'Dewan
Menyapa'
bersama
Tribun Jogja
menghadir-
kan jajaran
Komisi B
DPRD Kota
Yogya,
Jumat (12/7).



Pengaturan Transportasi Jangan Tinggalkan Aspek Budaya dan Wisata

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta agar tidak melupakan aspek pariwisata dan kebudayaan dalam mengatur skema transportasi publik. Keberadaan sumbu filosofi yang kini menjadi kekuatan dan daya tarik baru bagi Kota Yogyakarta dapat dijadikan sebagai patokan, untuk menentukan rekayasa lalu lintas terbaik.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mengatakan, penetapan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sangat berdampak pada sektor transportasi kota. Penetapan itu, lanjutnya, membuat Pemkot Yogyakarta harus menerapkan skema khusus untuk mengakomodir garis tengah di wilayahnya tersebut.

Dengan begitu, karakteristik transportasi publik di sisi barat dan timur Kota Yogyakarta bakal mengalami perbedaan ketika dibandingkan dengan area tengah kota. "Oleh sebab itu di tengah-tengah ini harus diatur dengan regulasi yang berkaitan dengan kebudayaan," kata Antoro di sela agenda diskusi 'Dewan Menyapa' bersama *Tribun Jogja*, Jumat (12/7).

Sebagai Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka-Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Antoro memastikan, bahwa hal tersebut sudah masuk pembahasan. "Kita harus bicara hari ini dan yang akan datang. Salah satu esensinya adalah, merencanakan, serta merealisasikan skema transportasi yang layak dan pas untuk Kota Yogyakarta," tegasnya.

Di samping itu, Antoro menyebut, Kota Yogyakarta kini sudah harus memikirkan dampak operasional tol yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, jangan sampai wisatawan

yang biasanya transit dan menginap, kelaknya sekadar numpang lewat, sehingga tidak menimbulkan perputaran ekonomi.

"Solusinya, sekarang bagaimana Dishub (Dinas Perhubungan) mempersiapkan skema transportasi di Kota Yogyakarta, terkait dampaknya pada aspek pariwisata dan kebudayaan, dalam satu kajian," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas lebih lanjut masih perlu dilakukan oleh pihak eksekutif. Sehingga, kenyamanan berkendara benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di tengah 'pertumbuhan' kendaraan yang teramat masif dewasa ini.

"Bertambahnya angka kelulusan, selaras dengan bertambahnya kendaraan bermotor. Setiap tahunnya, lebih dari 60 ribu mahasiswa tumpuk blek di DIY dan Kota Yogyakarta jadi magnetnya," tuturnya.

Namun, ia tidak menampik, upaya mengatur kepadatan lalu lintas tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan sektor ekonomi. Misalnya, ketika dibuat kebijakan bus pariwisata dilarang masuk pusat Kota Yogyakarta, akan banyak pelaku usaha yang protes karena tidak bisa terjangkau secara langsung.

"Sebenarnya itu bisa diatasi dengan model-model transportasi publik yang sudah ada sekarang, seperti Trans Jogja atau shuttle wisata 'Si Thole'. Jika dioptimalkan, itu bisa memberi rasa nyaman layaknya yang diinginkan masyarakat dan wisatawan, tinggal bagaimana komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi terbaik," pungkas Oleg. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005